



## Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembayaran Dana Pensiun Pada PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta

**Vika Aleyda Zahra**

Universitas Islam Indonesia

Email : [20312566@students.uii.ac.id](mailto:20312566@students.uii.ac.id)

**Maulidyati Aisyah**

Universitas Islam Indonesia

Email : [093120101@uui.ac.id](mailto:093120101@uui.ac.id)

Korespondensi penulis: [20312566@students.uii.ac.id](mailto:20312566@students.uii.ac.id)\*

**Abstract.** *This study explores the implementation of internal controls over pension fund payments at PT XYZ (Persero) Branch Yogyakarta using the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 2013 framework. Effective accounting systems are considered crucial in supporting company activities, including pension fund management. Cash disbursement systems are the primary focus in managing company operations, with the aim of improving effectiveness and preventing fraud. Previous studies indicate the necessity of internal controls to detect and prevent fraud, with COSO being a relevant framework in this regard. Qualitative analysis method was employed in this study, with primary data collected through interviews and documentation. The results indicate that PT XYZ (Persero) Branch Yogyakarta has effectively implemented internal controls, in line with the principles outlined in the COSO 2013 framework.*

**Keywords:** *COSO 2013, Pension Fund, Internal Control.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengeksplorasi penerapan pengendalian internal atas pembayaran dana pensiun pada PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta dengan menggunakan kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) 2013. Sistem akuntansi yang baik dianggap penting dalam mendukung aktivitas perusahaan, termasuk dalam pengelolaan dana pensiun. Sistem pengeluaran kas menjadi fokus utama dalam mengatur operasi perusahaan, dengan harapan meningkatkan efektivitas dan mencegah kecurangan. Studi sebelumnya menunjukkan perlunya pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, dengan COSO menjadi kerangka kerja yang relevan dalam hal ini. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta telah menerapkan pengendalian internal secara baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kerangka kerja COSO 2013.

**Kata kunci:** COSO 2013, Dana Pensiun, Pengendalian Internal.

### LATAR BELAKANG

Sistem merupakan gabungan dari beberapa elemen yang berhubungan agar mempermudah arus informasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu (Wijaya & Sukandani, 2019). Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang pastinya memerlukan sebuah sistem yang baik untuk menunjang aktivitas perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan juga dituntut untuk dapat menyajikan suatu sistem akuntansi yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan (Handayani, 2020). Ada beberapa siklus yang terjadi pada sistem informasi akuntansi seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus penggajian dan sistem buku besar pelaporan (Romney et

al., 2011). Perusahaan menggunakan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk mengatur operasinya. Sistem informasi yang baik diharapkan dapat mengatur semua operasi perusahaan dengan baik (Wijaya & Sukandani, 2019).

Pada Oktober 2023, terdapat kasus penyelewengan terhadap pengelolaan dana pensiun. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa terdapat 70 persen dari 48 dana pensiun di bawah naungan BUMN yang berstatus tidak sehat. Selain adanya penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatnya potensi masalah pada dana pensiun BUMN. Menteri BUMN menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Hasil dari audit tersebut terdapat lebih dari 30 dana pensiun BUMN yang berstatus tidak sehat. BPKP memberikan rekomendasi yaitu menekankan pentingnya dana pensiun BUMN meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola, mulai dari pembiayaan, proses investasi, hingga manfaat bagi para pensiunan (Nugraha, 2023).

Salah satu aspek dalam pengelolaan dana pensiun yakni pengendalian internal yang efektif, dengan adanya penerapan pengendalian internal pengeluaran kas dapat meningkatkan efektivitas pengeluaran kas perusahaan serta menghindari adanya penyelewengan seperti perubahan laporan atau perhitungan (Ferdila & Novita, 2022). Studi dari Marciano menyatakan bahwa dalam menjaga efektivitas dari suatu aktivitas transaksi pengeluaran kas perlu dilakukannya pengendalian internal yang ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian internal digunakan sebagai alat untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) untuk mengawasi sumber daya perusahaan (Arifiani et al., 2022). Dalam penerapan sistem pengendalian intern diperlukan perancangan sistem informasi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh karyawan telah mengerti dengan baik tugas dan tanggungjawab yang relevan kepada setiap bagian yang terkait (Katiandagho et al., 2023).

Salah satu kerangka kerja yang relevan dengan pengendalian internal yaitu *framework* COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). COSO memiliki 5 komponen, semua komponen tersebut harus ada didalam suatu perusahaan agar tertata dengan baik dan terjamin keamanan dalam perusahaan (Romney et al., 2011).

## KAJIAN TEORITIS

COSO atau *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan panduan praktis bagi manajemen serta auditor yang terkait dengan evaluasi dan perbankan sistem pengendalian internal. *COSO framework* dikeluarkan pengendalian internal yang diterima secara luas sebagai otoritas pengendalian internal dan dimasukkan kedalam kebijakan, peraturan dan regulasi yang digunakan dalam mengendalikan aktivitas. Berdasarkan *COSO Internal Control – Integrated Framework*, kerangka kerja ini untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Pada tahun 2013, standar ini diperbaharui menjadi kerangka kerja pengendalian internal COSO 2013. Berikut adalah lima komponen dan 17 prinsip dari kerangka kerja COSO :

1. Lingkungan Pengendalian
  - a) Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
  - b) Menjalankan tanggungjawab pengawasan.
  - c) Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen yang diawasi oleh dewan.
  - d) Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi.
  - e) Menegakkan akuntabilitas.
2. Penilaian Risiko
  - a) Menentukan tujuan dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai.
  - b) Mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola.
  - c) Mempertimbangkan potensi *fraud*.
  - d) Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.
3. Aktivitas Pengendalian
  - a) Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian.
  - b) Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi dan informasi.
  - c) Menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang relevan.
4. Informasi dan Komunikasi
  - a) Memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan.
  - b) Mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung

jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen pengendalian internal lainnya.

c) Mengkomunikasikan permasalahan internal yang relevan kepada pihak eksternal.

#### 5. Aktivitas Pemantauan

a) Melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah terhadap komponen pengendalian internal.

b) Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan kepada pihak yang bertanggung jawab.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar bukan menekankan pada angka (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisa data model Miles and Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Komponen Lingkungan Pengendalian**

Pada penerapan komponen lingkungan pengendalian, PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta menekankan karyawannya untuk mematuhi pedoman perilaku etika atau *code of conduct* yang dibuat atas persetujuan antara direktur, komisaris dan seluruh karyawan. Pedoman tersebut terdapat pada peraturan bersama direksi dan dewan komisaris tentang pedoman *good corporate governance*. Didalamnya terdapat prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. Selain itu, adanya nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Setiap tahun karyawan harus menandatangani pakta integritas guna memberikan komitmen terhadap nilai etika yang ada di perusahaan. Nilai tersebut diletakkan di beberapa sudut ruangan yang harus diterapkan oleh karyawan saat bekerja sehingga dapat membentuk nilai etika dan integritas pada setiap karyawan maupun jajaran direksi. Hal tersebut terlihat dari sikap karyawan yang menerapkan nilai AKHLAK dan nilai GCG antar karyawannya. Berdasarkan praktik yang diterapkan perusahaan, maka prinsip etika dan integritas sesuai dengan prinsip *internal control* COSO

2013 dengan membuktikan terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan yang berkomitmen terhadap nilai etika dan integritas.

Pada prinsip tanggung jawab pengawasan yang dilakukan dalam aktivitas transaksi pengeluaran kas khususnya pembayaran dana pensiun sudah cukup baik. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran dana pensiun, perusahaan melakukan pengawasan dari bidang keuangan yang mana telah diatur dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). *Branch manager* dan kepala bidang keuangan terlibat dalam persetujuan transaksi pengeluaran kas. Dengan adanya pengawasan ini dapat membuktikan apakah telah sesuai dengan SOP atau tidak. Perusahaan juga melakukan monitoring pemindahan buku dengan cara otentikasi, dimana setiap bulan peserta pensiun melakukan otentikasi. Jika 3 bulan berturut-turut tidak melakukan otentikasi maka perusahaan bekerjasama dengan mitra untuk mengunjungi peserta yang bersangkutan (Layanan Kunjungan Nasabah) karena sudah termasuk rekening pasif. Dengan hal ini, maka kegiatan tanggung jawab pengawasan sesuai dengan prinsip *internal control* COSO 2013.

Pada lingkungan pengendalian aktivitas pembayaran dana pensiun perlu melakukannya penetapan struktur, wewenang, dan tanggung jawab guna mengurangi penyelewengan pada proses pembayaran dana pensiun. Pada praktiknya, pemisahan tugas dan wewenang sangat terlihat dimana setiap bidang mempunyai tugasnya masing-masing, sehingga sistem akuntansi pengeluaran kas telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang ada. Perusahaan mempunyai struktur organisasi diantaranya *Branch manager* membawahi bagian SDM, Keuangan, layanan & Kepesertaan. Untuk pembayaran dana pensiun lebih banyak mengarah kepada bagian layanan & kepesertaan dan keuangan. Jalur pelaporan dimulai dari bidang layanan melakukan *create* data pensiun untuk dibayarkan setiap bulan, kemudian melakukan verifikasi dokumen oleh bidang keuangan. kemudian, pengeluaran kas yang dilakukan akan diotorisasi oleh kepala bidang keuangan, kepala seksi administrasi dan kepala seksi kas. Dari keuangan akan membayarkan sesuai dengan listing yang diberikan oleh bidang layanan. Adanya struktur organisasi dan prosedur aktivitas pengeluaran kas yang telah diterapkan perusahaan sesuai dengan prinsip *internal control* COSO 2013.

Komitmen terhadap kompetensi merupakan dasar untuk lingkungan pengendalian. Dengan adanya komitmen tersebut akan melatarbelakangi seseorang dalam menentukan pekerjaannya. Pada praktik yang diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan prinsip komitmen terhadap kompetensi sudah sangat baik. Perusahaan memberikan fasilitas dengan mengadakan berbagai pelatihan baik *softskill* maupun *hardskill* untuk menunjang kompetensi karyawannya. Divisi *Corporate University* yang terdapat di kantor pusat akan mengakomodir

semua pelatihan. Setiap tahunnya masing-masing kantor cabang menyusun *Training Need Analysis* (TNA) yang berisikan kebutuhan pelatihan dari tiap kantor cabang. Untuk bidang keuangan melaksanakan pelatihan brevet pajak dan pelatihan auditor. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan menggunakan *E-Learning* yang dilakukan sebulan sekali melalui portal yang telah disediakan. Dengan adanya pelatihan *softskill* dan *hardskill*, maka prinsip komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip *internal control* COSO 2013.

Prinsip menegakkan akuntabilitas pada perusahaan dapat terlaksana dengan baik yakni dengan melakukan verifikasi dari bidang layanan dan keuangan serta dilakukannya otorisasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas terdapat pedoman verifikasi klaim dan *voucher-voucher*. Selain itu, terdapat audit internal yang dilakukan oleh AMI (Audit Mutu Internal) yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki sertifikasi sebagai auditor. AMI dilakukan dengan mengaudit lintas bidang yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun serta terdapat audit dari kantor pusat yakni divisi SPI (Satuan Pengawas Internal). Berdasarkan temuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntabilitas atas sistem pengendalian internal yang sesuai dengan prinsip *internal control* COSO 2013.

### **Komponen Penilaian Risiko**

Penerapan penilaian risiko dalam menentukan tujuan yang jelas, dalam praktiknya PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta memiliki standar perusahaan yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang sesuai dengan standar ISO 9001:2015. Dalam melakukan pelayanan kepada peserta pensiunan mengedepankan moto 5T yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah dan tepat administrasi. Maksud dari 5T ini agar dalam proses pembayaran dana pensiun dapat tepat kepada peserta pensiun yang ditujukan, tepat waktu dalam pembayaran, tepat tempat penyaluran dana pensiun, tepat jumlah atau nominal pembayaran dan tepat dalam proses administrasi. Kebijakan ini dikomunikasikan ke lingkungan PT XYZ (Persero) dan *stakeholder* guna menjamin layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan peserta. Dengan adanya standar yang telah diterapkan oleh perusahaan mengindikasikan bahwa telah diterapkannya tujuan sesuai dengan prinsip COSO *internal control* 2013.

Setelah menetapkan tujuan untuk menganalisis risiko yang mungkin terjadi, maka perusahaan perlu melakukan identifikasi dan analisis dari risiko tersebut. Pada peraturan bersama direksi dan dewan komisaris tentang pedoman *good corporate governance* didalamnya terdapat pedoman teknis penerapan GCG diantaranya terdapat pedoman manajemen risiko yang digunakan untuk meminimalisasi kerugian dan meningkatkan peluang.

Perusahaan membentuk divisi manajemen risiko sebagai perwakilan dari *business control*, tugasnya memantau pelaksanaan operasional perusahaan. Diluar *business control* ada pemilik risiko yaitu *branch manager* dan *risk officer* yaitu kepala bidang keuangan. *Risk officer* menyusun analisis risiko yang mungkin muncul, mencari penyebab, mengidentifikasi apakah sudah berjalan sesuai SOP, mencari tindak lanjut agar risiko tidak terjadi dan mencari solusi. Setelah itu akan dilakukan *monitoring* evaluasi risiko yang dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap triwulan. Hasilnya akan dievaluasi kembali oleh manajemen risiko. Dengan adanya analisis risiko diharapkan agar pembayaran dana pensiun dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen risiko dapat memotong kejadian kerugian yang mungkin terjadi sehingga efeknya tidak akan terjadi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip COSO *internal control* 2013.

Pada prinsip mempertimbangkan potensi *fraud* pada aktivitas pengeluaran kas dana pensiun dinilai cukup baik dalam penggunaan dokumen pendukung. Peraturan direksi tentang pedoman verifikasi dokumen transaksi pembayaran didalamnya terdapat proses transaksi keuangan pada pusat pertanggungjawaban (PP) diantaranya pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen transaksi pembayaran dan dokumen pendukung. Pengecekan tersebut dilakukan secara elektronik dilakukan mulai dari unit pengolah sampai dengan unit kerja yang membidangi keuangan. Dalam penggunaan SAP (*System Application and Product in data processing*), setiap pembayaran SPP klim harus melampirkan dokumen pendukung yang telah diatur dalam SOP serta adanya pedoman verifikasi dokumen guna meminimalisir adanya *fraud*. Untuk klim umum tetap harus melampirkan dokumen pendukung. Pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dilakukan dengan adanya lembar rotasi dokumen yang dicek secara berkala oleh beberapa divisi. Pada prinsip ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip mempertimbangkan potensi *fraud* sesuai dengan *internal control* COSO 2013 dengan adanya kehati-hatian dalam prosedur pengeluaran kas dana pensiun.

Pada penerapan prinsip mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan, perusahaan dikatakan sudah cukup baik dalam keterlibatan pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Apabila terdapat permasalahan di kantor cabang maka akan dilaporkan kepada bidang yang bersangkutan terlebih dahulu, jika tidak dapat solusinya akan disampaikan kepada *branch manager*. Namun, apabila masih belum mendapat solusi maka akan dilaporkan kepada kantor pusat dan hasilnya akan disampaikan ke kantor cabang. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak manajemen berperan dalam proses pengambilan keputusan sehingga sesuai dengan prinsip *internal control* 2013.

### **Komponen Aktivitas Pengendalian**

Penerapan komponen aktivitas pengendalian dengan prinsip memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian telah dilakukan dengan baik. Pada praktiknya PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengeluaran kas yang dilakukan setiap hari guna memastikan bahwa pengeluaran kas telah sesuai dengan yang seharusnya. Evaluasi tersebut dilakukan oleh kepala bidang keuangan dengan mengecek laporan harian kasir secara keseluruhan dan mengecek kesesuaian *voucher*. Selain itu, melakukan rekonsiliasi kas bank untuk mengetahui apakah sudah sesuai antara uang yang masuk di rekening dengan uang yang tercatat pada SAP. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengembangan kegiatan pengendalian dalam mengatasi risiko, sehingga penerapan prinsip memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian sudah sesuai dengan prinsip COSO *internal control* 2013.

Disisi lain, PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta telah menerapkan prinsip memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi dan informasi. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan sistem informasi berupa SAP (*System Application and Product in data processing*). Dengan menggunakan SAP yang memiliki fungsi sebagai alat pencatatan transaksi serta detail mengenai keuangan, aplikasi ini sangat efektif digunakan dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Selain SAP, terdapat beberapa aplikasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembayaran dana pensiun seperti Tdes, E-dapem, Otentikasi, TOS cabang, Enrollment, E-SPTB dan ELO.. Hal ini juga diatur dalam Peraturan bersama direksi dan dewan komisaris tentang pedoman *good corporate governance* yang didalamnya terdapat pedoman tata kelola teknologi informasi. Pada pedoman tersebut menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan disusun dan ditetapkan guna memperkuat peran teknologi informasi sebagai *business driver* pada perusahaan serta perwujudan visi teknologi informasi perusahaan yaitu *strategic business partner*. Atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi dan informasi sesuai dengan COSO *internal control* 2013.

Pada prinsip yang terakhir dalam komponen aktivitas pengendalian yaitu menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang relevan. Dalam praktiknya terdapat kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengeluaran kas terutama pembayaran dana pensiun, dengan adanya pedoman verifikasi dokumen transaksi pembayaran yang telah diatur di dalam SOP. Dokumen tersebut dapat diakses oleh seluruh karyawan sehingga meminimalisir adanya miskomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip

menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang relevan telah sesuai dengan *COSO internal control* 2013.

### **Komponen Informasi dan Komunikasi**

Pada penerapan prinsip memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan terhadap komponen informasi dan komunikasi sudah cukup baik. Perusahaan dalam melakukan aktivitas pengeluaran kas menggunakan kode yang berbeda-beda dan tersusun dalam penggunaan nomor dokumen. Setiap dokumen diberikan bukti dokumen transaksi, dokumen tersebut dilakukan backup dalam bentuk *soft file* dan dokumen fisik. Apabila terjadi kekeliruan dalam dokumen maka akan di konfirmasi pada bagian verifikator. Keseluruhan dokumen yang terjadi pada aktivitas pengeluaran kas yang telah dinyatakan lunas oleh divisi keuangan akan diarsipkan. Untuk arsip digital dapat dilihat pada aplikasi ELO, sedangkan untuk dokumen fisik dapat dilihat di bagian Dosir. Berdasarkan temuan diatas, prinsip memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan telah sesuai dengan *internal control* COSO 2013.

Dalam penggunaan informasi perlu adanya komunikasi yang baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pada praktiknya aktivitas pelaporan transaksi pengeluaran kas seperti pencatatan, penyajian dan pelaporan sudah terkomputerisasi pada SAP. Namun, hanya orang yang memiliki user yang dapat mengaksesnya. Untuk seluruh karyawan dapat mengecek melalui ELO dengan mengetahui nomor SAP pada transaksi tersebut. Sedangkan, pihak umum atau peserta akan diberikan informasi melalui SMS *blast* mengenai pendapatan yang mereka terima ataupun bisa dicek secara langsung melalui *customer service*. Dalam hal ini perusahaan telah menerapkan prinsip sesuai dengan *internal control* COSO 2013.

Prinsip selanjutnya dalam komponen informasi dan komunikasi yaitu mengkomunikasikan permasalahan internal yang relevan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Pada penerapannya, pihak eksternal tidak mengawasi secara langsung kegiatan operasional perusahaan. Namun, dilakukan audit oleh pihak eksternal seperti OJK dan KAP yang dilakukan setahun sekali. Dalam praktiknya apabila terjadi permasalahan eksternal dengan mitra bayar, biasanya terjadi karena dana pensiun yang belum dipindah bukukan ke rekening penerima pensiun atau ada rekening yang salah/tidak aktif. Pada rekening salah/tidak aktif dilakukan rekam melalui E-dapem sebagai rekening invalid yang kemudian akan dilakukan perbaikan oleh pihak perusahaan agar dapat melakukan pindah buku ke rekening yang seharusnya. Sehingga dalam mengkomunikasikan permasalahan tersebut akan disampaikan di grup *WhatsApp* antara perusahaan dengan mitra terkait. Untuk monitoring pembayaran pensiun dapat dilihat pada

aplikasi E-Dapem. Maka, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip mengkomunikasikan permasalahan internal yang relevan kepada pihak eksternal sesuai dengan *internal control* COSO 2013.

### **Komponen Aktivitas Pemantauan**

Pada penerapan prinsip melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah terhadap komponen aktivitas pemantauan, PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta melakukan evaluasi pengeluaran kas dengan melakukan pemantauan terhadap *cash on hand* (COH). Dalam praktiknya penggunaan COH diambil hanya sesuai dengan keperluan sehingga jarang digunakan dalam aktivitas pengeluaran kas. Namun, apabila ada tetap dimasukkan kedalam laporan harian kasir. Untuk kebutuhan bagian umum dilakukan menggunakan cek. Sedangkan untuk pembayaran SPP Klim dilakukan dengan token transfer. Dalam proses penyaluran pembayaran SPP Klim terutama pembayaran dana pensiun dilakukan menggunakan aplikasi CMS. Atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah sesuai dengan *COSO internal control* 2013.

Prinsip mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam komponen aktivitas pemantauan sudah dilakukan dengan cukup baik. Perusahaan melaksanakan rapat komite anggaran yang membahas mengenai operasional perusahaan yang dilakukan tiap triwulan. Terdapat Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan bersamaan dengan AMI. Hasil dari AMI akan ditindaklanjuti pada RTM dan akan dilaporkan kepada kantor pusat dan disampaikan kepada direksi. Selain itu, terdapat evaluasi dengan mitra yang dilakukan selama enam bulan sekali yang berguna untuk menilai kinerja mitra karena akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan kepada pihak yang bertanggung jawab telah sesuai dengan *COSO internal control* 2013.

**Tabel 1. Hasil Pembahasan**

<b>Komponen Pengendalian Internal</b>	<b>No</b>	<b>Prinsip Pengendalian Internal Menurut COSO</b>	<b>Ket</b>
Lingkungan Pengendalian	1	Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.	Sesuai COSO
	2	Menjalankan tanggungjawab pengawasan.	Sesuai COSO
	3	Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.	Sesuai COSO
	4	Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi.	Sesuai COSO
	5	Menegakkan akuntabilitas.	Sesuai COSO
Penilaian Risiko	1	Menentukan tujuan dengan cukup jelas.	Sesuai COSO
	2	Mengidentifikasi dan menganalisis risiko.	Sesuai COSO
	3	Mempertimbangkan potensi <i>fraud</i> .	Sesuai COSO
	4	Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan.	Sesuai COSO
Aktivitas Pengendalian	1	Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian.	Sesuai COSO
	2	Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi dan informasi.	Sesuai COSO
	3	Menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang relevan.	Sesuai COSO
Informasi dan Komunikasi	1	Memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan.	Sesuai COSO
	2	Mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab.	Sesuai COSO
	3	Mengkomunikasikan permasalahan internal yang relevan kepada pihak eksternal.	Sesuai COSO
Aktivitas Pemantauan	1	Melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah terhadap komponen pengendalian internal.	Sesuai COSO
	2	Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan kepada pihak yang bertanggung jawab.	Sesuai COSO

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan penerapan pengendalian internal atas pembayaran dana pensiun pada PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta menunjukkan hasil yang sudah baik, dilihat dari kesesuaian data yang diperoleh penulis dengan prinsip-prinsip yang ada pada kerangka kerja COSO 2013. Pada penerapan komponen lingkungan pengendalian, perusahaan dikatakan sudah menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat pada COSO *internal control* 2013. Keterbatasan penelitian ini yaitu dalam proses pengumpulan data, aktivitas narasumber yang cukup padat sehingga mempengaruhi konsentrasi narasumber dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara. Selain itu, terbatasnya waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifiani, F., Utami, H., & Islam, A. A. N. (2022). Analisis Penerapan Internal Control Transaksi Pengeluaran Kas Pada PT Suvarna Bhumi Indonesia. 54–67.
- COSO, C. C. of S. O. of the T. (2023). Achieving Effective Internal Control Over Sustainability Reporting (ICSR): Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control — Integrated Framework. COSO-ICSR Report, 1–114.
- Ferdila, & Novita, E. M. (2022). Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Dalam Upaya Menghindarkan Kecurangan Akuntansi Pada SPBU Vitka Point Batam. *Reliable Accounting Journal*, 2(1), 8–17. <https://doi.org/10.36352/raj.v2i1.424>
- Handayani, S. (2020). Sistem Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas Pada PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Nugraha, D. (2023). 70 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah. Kompas.Id.
- Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor PD 51/DIR/2020 atau KEP-23/DK-TASPEN/122020 tentang Pedoman Good Corporate Governance.
- Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor PD-19/DIR/2021 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008.
- Romney, M., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2011). *Accounting information systems*, Global Edition 15/E (15th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Wijaya, E., & Sukandani, Y. (2019). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada PT. TASPEN (Studi pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya). *Publikasi Ilmiah Akuntansi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*, 1(1), 1479–1089.